

Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia

Ina Heliany

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular

Email : inaheliany6@gmail.com

Abstrak. Selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional, khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi. Di era demokrasi ini peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian di Indonesia membawa perubahan besar-besaran dalam sistem pembangunan Indonesia. Pola kebijakan yang sebelumnya amat sentralistik ikut mendapatkan reformasi melalui kebijakan desentralistik. Pada dasarnya perubahan kebijakan fiskal ini sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, hal ini sesuai dengan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya salah satunya dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai. Namun dalam implementasinya, kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan cenderung bersifat insidental tanpa perencanaan yang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman induk yaitu konstitusi UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentang Apakah tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi dan bagaimanakah peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana serta para ahli terkemuka. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi, selain itu dalam hal mengatasi resesi ekonomi di Indonesia Kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program-program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi.

Kata kunci: Peran Kebijakan fiskal, resesi ekonomi

Abstract. In line with the objectives of the national economic system, fiscal policy can be used as a major instrument in addition to monetary policy to achieve national goals, especially those that are more of an economic purpose. In this era of democracy the role of fiscal policy in influencing the economy in Indonesia has brought about massive changes in Indonesia's development system. The previously very centralized policy pattern has also gained reform through decentralized policies. Basically this change in fiscal policy is largely determined by the government's involvement in economic activity, this is in accordance with the role of the government to realize the welfare of its people, one of which is by using an appropriate fiscal policy instrument. But in its implementation, fiscal policies that have been carried out tend to be incidental without proper planning and not in accordance with the main guidelines, namely the constitution of the 1945 Constitution. In connection with the above, this research will describe the objectives of fiscal policy in the development of democracy and how the role of policy fiscal in the overcome the economic recession in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. It is said to be normative juridical

because this study uses only secondary data sources, namely legislation, theories and opinions of leading scholars and experts. In addition, this study also uses a qualitative Qualitative approach because it is a process of analyzing data without using formulas and numbers derived from information from the literature study, namely data taken from relevant agencies and observations in research conducted with the problems discussed. that. The results of the study show that fiscal policy in democratic development in Indonesia aims to increase employment opportunities, increase and distribute national income, increase the rate of investment, and improve economic stability, in addition in the overcome the economic recession in Indonesia Fiscal policies play a role in encouraging the achievement of development targets which have been set. This role is in line with one of the APBN functions as a means of maintaining stability and accelerating economic performance so that economic growth can be achieved, creating jobs, alleviating poverty, organizing government programs or plans effectively, efficiently, and effectively and avoiding corruption.

Key words: *The role of fiscal policy, economic recession*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Governments need money. Modern governments need lots of money. How they get this money and whom they take it from are two of the most difficult political issues faced in any modern political economy.” - Sven Steinmo, Taxation and Democracy, 1993

Kebijakan dalam perekonomian sangat diperlukan mengingat bahwasanya tidak semua kebijakan akan berjalan sesuai rencana yang ada.. Keberadaan kebijakan dalam dunia ekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar. Untuk itulah kebijakan selalu ada dalam penyebutan ekonomi dan salah satunya adalah kebijakan fiskal yang diterapkan dalam resesi ekonomi dalam rangka menghadapi keadaan ekonomi Dunia khususnya Indonesai setelah terjadi wabah corona yang disebabkan oleh virus Covid-19 .

Selaras dengan hal tersebut untuk mencapai tujuan nasional khususnya dalam hal yang bersifat pemulihkan keadaan ekonomi maka kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengatasi resesi ekonomi saat ini. Kebijakan fiskal sendiri mempunyai dua komponen utama, pertama komponen penerimaan yang terdiri dari pajak dan bukan pajak, dan yang kedua komponen pengeluaran pemerintah. Dari kedua komponen pajak dan bukan tersebut yang perlu kita perhatikan adalah

pengelolaan manajemen keuangan negara yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Pada penerapannya manajemen keuangan negara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 dan tiga prinsip pokok yaitu *Performance Based Budgeting, Medium Term Expenditure Framework (MTEF), dan Unified Budget*. Diharapkan dengan mengimplementasikan ketiga prinsip tersebut dapat menciptakan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran negara, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal mengatasi resesi ekonomi saat ini peran kebijakan fiskal sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia agar dapat membawa perubahan besar-besaran dalam sistem pembangunan Indonesia. Sentuhan ini juga dirasakan dalam pola kebijakan yang ada sebelumnya amat sentralistik ikut mendapatkan reformasi melalui kebijakan desentralistik. Menurut Rondinelli, desentralisasi merupakan pemindahan wewenang dan tanggung jawab serta fungsi publik dari pemerintah pusat kepada sector swasta atau organisasi pemerintahan yang ada di bawahnya.

Pada dasarnya perubahan kebijakan fiskal ini sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, hal ini sesuai dengan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya salah satunya dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai. Namun dalam implementasinya, kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan cenderung

bersifat insidental tanpa perencanaan yang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman induk yaitu konstitusi UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentang Apakah tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi dan bagaimanakah peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia?

2. Rumusan Masalah

1. Apakah tujuan dari kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi ?
2. Bagaimanakah peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia ?

3. Tujuan dan Penelitian

1. Tujuan penelitian :
 1. Untuk mengetahui tujuan dari kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia
 2. Untuk mengetahui dan memahami peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia.

METODE

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Fokus penelitian kualitatif ada pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yuridis normatif. Yakni pendekatan dengan menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan hukum yang dihubungkan dengan fenomena sosial tersebut sehingga didapat suatu hasil dan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi

Salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah mengetahui bagaimana laju pertumbuhan ekonomi saat ini. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Dalam rangka mencari inovasi dan terobosan baru agar dapat berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak problem dan

tantangan yang menyerbu perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk mencari terobosan dan inovasi baru tersebut dan salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal. Harapannya kebijakan fiskal dapat memberikan kesejahteraan baik material maupun non material. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut di era pembangunan ini, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja dijadikan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional tersebut. Secara lebih khusus tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi adalah sebagai berikut:

2. Meningkatkan kesempatan kerja

Kesejahteraan merupakan factor yang sangat diidamkan oleh masyarakat, dengan terbukanya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, karena keduanya adalah indikator kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat 2 berbunyi : "semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak". Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal.

Untuk mengurangi angka pengangguran, bukan hanya andil pemerintah tapi masyarakat juga harus ikut andil ,salah satu contoh nyata adalah dengan mengoptimalkan kemampuan yang mereka miliki, seperti halnya ada sebuah pergerakan masyarakat berupa UKM . Terbukti bahwasannya 94% sumbangan ekonomi Indonesia diperoleh dari UKM dan 6% dari industri yang sebagian besar dikuasai oleh asing. Diharapkan dengan penerapan kebijakan fiskal ini maka masalah pengangguran teratasi.

3. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Adanya ketimpangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah merupakan masalah yang harus segera diatasi. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut, adalah menerapkan kebijakan fiskal dengan cara memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran tertentu untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena jika ketimpangan ini tidak diatasi dapat menyebabkan

social unrest dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik

4. Meningkatkan laju investasi

Salah satu cara untuk meningkatkan laju investasi baik dalam sector swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan peningkatan investasi pada sector-sektor yang mempunyai pengeluaran besar untuk kebutuhan masyarakat

5. Meningkatkan stabilitas ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan stabilitas ekonomi jangka pendek di Indonesia. Kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan negara dan peningkatan efektivitas serta efisiensi pengeluaran negara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil karena disebabkan oleh wabah Corona dan Virus Covid -19. Mewabahnya virus ini merupakan guncangan yang sangat berat untuk kondisi perekonomian di Indonesia, ditambah lagi dengan tekanan inflasi harus segera dapat diatasi oleh pemerintah. Kebijakan fiskal juga harus menstabilkan harga pasar. Karena hal ini akan berakibat fatal terhadap perekonomian negara, ketika harga pasar terus menerus turun maka yang akan terjadi adalah banyak pengusaha dan UKM gulung tikar karena akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah keuntungan, sedangkan jika harga terus menerus melonjak naik maka yang akan terjadi adalah inflasi. Sedangkan jangka panjang inflasi menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah.

6. Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia

Pemerintah tentu saja membutuhkan kebijakan untuk membuat rakyatnya sejahtera dan salah satunya melalui kebijakan yakni kebijakan fiskal. Dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil. Dari dana APBN pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi seperti mengatasi inflansi.

Dalam mengatasi krisis ekonomi sangat diperlukann intervensi pemerintah baik

intervensi dalam bidang mkneter mauoun intervensi fiskal. Sehingga peran pemerintah bukan hanya sebagai " Penjaga Pos" dalam artian kalau dibutuhkan baru melakukan intervensi tetapi melalui kewenangan yang ada padanya wajib menjaga kestabilan antara penawaran dan permintaan , mencegah persaingan usaha yang tidak sehat serta monopoli dagang melindungi usaha kecil dan *infant*, serta menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang dapat menjadi pendorong jalannya roda perekonomian.

Dalam pembangunan demokrasi di Indonesia Kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program-program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi.

Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal juga sangat diharapkan agar tercipta pembangunan demokrasi yang berjalan dengan baik. Robert Naro berpendapat demokrasi dapat mendorong dan berpengaruh signifikan pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun, sejatinya demokrasi berkorelasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, menurut beliau : *the established links between democracy and growth are a result of the connections between democracy and other determinants of growth such as human capital and social capital, as the relationship is mediated by the quality of government.*

Oleh karena itu, sistem demokrasi itu sendiri harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara dan aparatur birokrasi, serta meningkatkan mutu sehingga pembangunan demokrasi yang baik dapat terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan perilaku pembuat kebijakan untuk menghindari pola perilaku korupsi. Pemerintahan yang bersih dari korupsi akan

mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, perdagangan, dan pergerakan modal yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menyelenggarakan program-program yang efektif dan efisien, sehingga pembangunan di segala bidang menjadi lebih baik pula.

Akan tetapi semua itu hanya bisa terjadi bila ada kontrol publik yang ketat melalui pers, yang merefleksikan kebebasan dalam mengartikulasikan pendapat umum. Jadi, peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi pembangunan demokrasi di Indonesia ini didasarkan atas prinsip-prinsip *good governance* yang baik yakni : transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Inilah yang disebut pengaruh bersyarat pembangunan demokrasi—*terms and conditions of the relations between democracy development*.

Dalam hal pembangunan demokrasi di Indonesia, pemerintah tidak boleh sembrono ketika membuat kebijakan. Salah satu contohnya adalah kebijakan fiskal yang diperoleh pemerintah melalui kenaikan harga pajak. Belum lama ini pemerintah menaikkan pajak biaya STNK. Sebelum mengambil kebijakan pemerintah seharusnya berfikir matang-matang untuk mengambil kebijakan itu, apakah kenaikan pajak itu memberatkan rakyat atau tidak. Jika pemerintah asal-asalan dalam mengambil kebijakan maka yang akan terjadi adalah pembangkangan oleh rakyat, yang disebabkan adanya mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan keuntungan saja, tapi dalam mengambil kebijakan pemerintah juga harus memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan. Bukankah negara demokrasi itu adalah negara yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan karena salah dalam menerapkan kebijakan, akhirnya dapat membuat keributan sehingga tidak tercapai peran kebijakan fiskal yang baik dalam mempengaruhi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Selain hal tersebut di atas peran kebijakan fiskal terhadap pembangunan demokrasi di

Indonesia adalah untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara, tanpa kehadiran dua komponen tersebut maka kegiatan perekonomian akan terancam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia. sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi. Kehadiran kebijakan fiskal adalah untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang ada dengan sumber manusia yang ada, karena jika hanya salah satunya yang menonjol akan menimbulkan sebuah ketimpangan dan permasalahan baru. Contohnya ketika sumber daya alam melimpah dan tidak ada tenaga ahli yang mengelola maka sumber daya yang ada akan menumpuk dan tidak ada gunanya. Di sisi lain ketika sumber daya manusia atau para ahli banyak dan tidak ada sumber daya alam yang memadai maka mereka akan beralih ke negara lain, karena mereka beranggapan tenaganya tidak didayagunakan di negaranya sendiri. Pemerintah juga tidak boleh pilih kasih dengan mengimport tenaga lain dari luar negeri sedangkan rakyat sendiri banyak yang menjadi pengangguran. Jika hal ini terus dilaksanakan bukan tidak mungkin pembangunan demokrasi tidak akan berjalan. Maka kebijakan fiskal disini berfungsi sebagai penyeimbang dan pengoptimalan sumber daya yang ada baik dari alam dan manusianya, manusia disini yang dimaksudkan adalah pekerja dari negeri sendiri bukannya dari negeri asing.

Kebijakan fiskal terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia juga berperan untuk mengoptimalkan kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Investasi juga merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara tentunya. Dengan

terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi maka terbuka peluang-peluang usaha untuk mendatangkan keuntungan besar bagi negara, dan dapat mengurangi pengangguran. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mendorong kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, sehingga pembangunan demokrasi yang diharapkan dapat terwujud di bumi pertiwi Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi
2. Dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia Kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi,

Saran

Agar tujuan kebijakan fiskal dan peran kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan seharusnya maka diperlukan kerjasama dari berbagai elemen baik oleh pemerintah/ negara sebagai pembuat kebijakan maupun oleh rakyat sebagai warga masyarakat yang harus mematuhi setiap kebijakan pemerintah sehingga pembangunan demokrasi di Indonesia dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari Buku

- Ennis Rondinelli. (2001). *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gilarso, T. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- I.Wayan Sudirman,(2017). *Kebijakan Fiskal Dan Moneter., Teori Dan Emperikal*.Jakarta. Prenada Media
- Purwanto, E. A. (2016). *Implementasi Kebijakan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ronny H. Soemitro. (1992). *Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno, P. (1983). *Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijaksanaan Fiskal*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Soediyono Reksoprayitno. (2000). *Ekonomi Makro - Analisis IS-LM dan Permintaan Penawaran Agregatif*. Yogyakarta : BPFE.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- B. Dari Jurnal
- Adeniyi, O.M. and A.O. Bashir. (2011). *Sectoral Analysis of the Impact of Public Investment on Economic Growth in Nigeria (1970 – 2008)*. *European Journal of Social Sciences*, 20(1):259-266.
- Anyualatha Haridison, (2013). *Pembangunan Politik : Demokrasi, Governance dan Supremasi Hukum* , *Jurnal Administrasi Publik*, FISIP Universitas Palangka Raya, ISSN 2337-4985.
- Baldacci, E.(2009) "Neither Sailing Against the Wind, Nor Going with the Flow: Cyclicalitv of Fiskal Policy in Indonesia, IMF Country Report No. 09/231."
- Bhattarai, K. dan Trzeciakiewicz, D. (2017). *Macroeconomic impacts of fiscal policy shocks in the UK: A DSGE*

analysis. *Journal of Economic Modelling*, 61(2), 321-338.

Ferry Prasetyia. (2011). Rekonstruksi Sistem Fiskal Dalam Bingkai Konstitusi. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011.

Plagerson, S., Patel, L., Hochfeld, T., & Ulriksen, M. S. (2019). Social policy in South Africa: Navigating the route to social development. *World Development*, 113, 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.019>

Schumpeter, Joseph A., (1997). *Economic History Association : The Creative Response in Economic History*, The *Journal of Economic History*, Vol. 7 No. 2, 1997, Cambridge University Press.

Zhou, Y., Guo, L., & Liu, Y. (2019). Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice. *Land Use Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>

C. Dari Internet

Anyualatha Haridison.(2013). *Pembangunan Politik : Demokrasi, Governance dan Supremasi Hukum* , Jurnal Administrasi Publik, FISIP Universitas Palangka Raya, oktober 2013 hal 3, ISSN 2337-4985 https://www.researchgate.net/publication/320432532_Pembangunan_Politik_Demokrasi_Governance_dan_Supremasi_Hukum

Saran Negara Nomor 4286

[remasi Hukum](#) , diakses pada tanggal 25 Januari 2021

Amich Alhumami, *Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi* <https://economy.okezone.com/read/2010/10/08/279/380384/demokrasi-dan-pertumbuhan-ekonomi> diakses tanggal 20 Januari 2021

Demokrasi dan Ekonomi <https://nasional.sindonews.com/read/1292610/18/demokrasi-dan-ekonomi-1521990565/16> diakses pada tanggal 10 oktober 2018

Kebijakan fiskal - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal, diakses tanggal 13 Januari 2021.

Mentri Keuangan RI. 2012. *Arah Kebijakan Fiskal, dan Recource Envelope Jangka Menengah dalam penyusunan RPJM 2010- 2014*. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014, dikuitp dari http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2_vzW3i3sVEJ:musrenbangnas.bappen.as.go.id/ .diakses tanggal 23 Januari 2021

D. Dari Undang-undang

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Indonesia, Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 , Tambahan Lemb